

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DI PUSKESMAS SUKARAMAI KOTA MEDAN

Siti Khofifah¹, Indah Doanita Hasibuan², Muthia Khanza Errisya³, Mutiara Rezqiqa Purba⁴, Syafirda Alifa Lubis⁵,

Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4,5}
sitikhofifah887@gmail.com

ABSTRAK

Pendahuluan: Pengelolaan keuangan dalam konteks Puskesmas merupakan aspek penting dalam menjamin operasional yang lancar dan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan adalah seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dalam upaya memperoleh sumber pendapatan, menggunakan dana, hingga mengalokasikan dan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pengelolaan Puskesmas merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola dan mengatur berbagai aspek operasional dan administratif dalam sebuah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). **Metode:** Menggunakan metode kualitatif dengan mengambil beberapa narasumber yang berasal dari petugas puskesmas Sukaramai. Dalam riset ini teknik yang digunakan adalah observasi dan wawancara. **Hasil:** Sumber pendapatan Puskesmas Sukaramai berasal dari berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, dan dana hibah. Pengelolaan keuangan mencakup aspek penerimaan, pengeluaran, pelaporan, pengawasan, dan monitoring dana, dengan fokus pada pengadaan obat-obatan, pembayaran gaji, operasional harian, pelatihan, dan program kesehatan masyarakat seperti imunisasi. Kendala yang dihadapi termasuk prosedur yang panjang untuk pengadaan barang dan perubahan peraturan dari Dinas Kesehatan. **Simpulan:** Pengelolaan keuangan di Puskesmas Sukaramai ini berjalan dengan baik, jelas dan transparan namun ada beberapa hambatan atau kendala yang mereka hadapi dalam mengelola keuangan puskesmas.

Kata kunci : Pengelolaan, keuangan, puskesmas

ABSTRACT

Introduction: Financial management in the context of Community Health Centers is an important aspect in ensuring smooth operations and quality health services for the community. Financial management is all activities related to financial activities in an effort to obtain sources of income, use funds, to allocate and achieve the goals of an organization. Community Health Center Management is a series of activities that aim to manage and regulate various operational and administrative aspects in a Community Health Center (Puskesmas). **Method:** Using qualitative methods by taking several sources from Sukaramai Community Health Center officials. In this research, the techniques used were observation and interviews. **Results:** Sukaramai Community Health Center's income sources come from various sources, including APBN, APBD, and grant funds. Financial management includes aspects of receipt, expenditure, reporting, supervision and monitoring of funds, with a focus on procurement of medicines, payment of salaries, daily operations, training and public health programs such as immunization. Obstacles faced include long procedures for procuring goods and changes in regulations from the Health Service. **Conclusion:** Financial management at the Sukaramai Community Health Center is running well, clearly and transparently, but there are several obstacles or obstacles that they face in managing the community health center's finances.

Keywords : Management, finance, health center

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai sumber daya (seperti manusia, uang, waktu, dan material) serta kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari pengelolaan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia guna mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks yang lebih luas, pengelolaan dapat merujuk pada pengaturan dan koordinasi berbagai aspek dalam suatu organisasi, proyek, atau kegiatan agar berjalan efisien dan efektif. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengarahkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi pengelolaan itu merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuantujuan organisasi. Hamiseno, sebagaimana dikutip Arikunto (1993:8) menyebutkan bahwa: "Pengelolaan adalah substantif dari mengelola". Sedangkan mengelola adalah kegiatan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan meliputi banyak kegiatan dan semuanya itu bersamasama menghasilkan suatu tujuan akhir, yang diberikan informasi bagi penyempurnaan kegiatan. Pengelolaan adalah bagian dari manajemen dimana terdapat fungsi- fungsi manajemen (Bararah, 2020).

Kuangan adalah cabang dari ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengalokasian dana serta sumber daya finansial lainnya. Ini

mencakup segala sesuatu yang terkait dengan perolehan, penggunaan, dan pengelolaan uang serta aset lainnya. Dalam konteks bisnis, keuangan juga mencakup pengelolaan modal, investasi, pembiayaan, dan risiko untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Selain itu, keuangan juga dapat merujuk pada bidang penelitian, analisis, dan praktik terkait dengan pergerakan dan manajemen uang dalam berbagai konteks, baik individu, perusahaan, maupun entitas publik. Manajemen keuangan melibatkan pengelolaan sumber daya finansial perusahaan secara keseluruhan, termasuk pengelolaan kas, pinjaman, investasi, dan aset. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan menghasilkan arus kas yang positif dan meminimalkan biaya finansial. Dalam melaksanakan tujuan ini, manajemen keuangan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu, risiko, dan biaya modal (Dicky, 2023).

Pengelolaan keuangan adalah seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dalam upaya memperoleh sumber pendapatan, menggunakan dana, hingga mengalokasikan dan auntuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pengelolaan Puskesmas merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola dan mengatur berbagai aspek operasional dan administratif dalam sebuah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan dasar di Indonesia memegang peran penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam menjalankan fungsinya, Puskesmas membutuhkan pendanaan yang memadai dan dikelola secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan yang baik di Puskesmas merupakan aspek krusial untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Puskesmas yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang

akuntabel, transparan, dan efisien di Puskesmas. (Hernita, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan kerangka metode kualitatif deskriptif. Populasi dan sampel diambil dari tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Sukarami Kota Medan yang terdiri dari kepala puskesmas dan bendahara puskesmas. Kajian ini dibuat dengan menggunakan instrumen penelitian berupa wawancara pada 2 petugas di Puskesmas Sukarami Kota Medan. Wawancara kami lakukan pada April 2024 dengan menerapkan etika penelitian seperti perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian.

3. HASIL

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dianalisis mengenai bagaimana pengelolaan keuangan di Puskesmas BLUD Medan.

Sumber Pendapatan

Terkait dengan hasil wawancara, dua informan mengatakan bahwa sumber pendapatan di Puskesmas Sukarami Kota Medan ini berasal dari jasa pelayanan pasien umum, JKN, APBN, APBD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan dana hibah. Maka hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Carlinda, 2022) yang menyatakan bahwa sumber pendanaan puskesmas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan Keuangan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya penting untuk kelangsungan operasional puskesmas itu sendiri, tetapi juga untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan di puskesmas biasanya mencakup beberapa aspek agar pengelolaan ini berjalan dengan baik. Penerimaan dana dari sumber pemerintah merupakan bagian penting dari

pengelolaan keuangan. Narasumber mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan keuangan otonomi di tiap daerah berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Christiari, 2021) mengatakan bahwa perbedaan potensi daerah, keterlibatan pihak eksternal (investor, pengusaha, dan masyarakat), kualitas sumber daya manusia, dan manajemen pengelolaan perekonomian daerah menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari kebijakan yang dijalankan. Pemerintah biasanya mengalokasikan anggaran kesehatan untuk puskesmas melalui berbagai program dan mekanisme, seperti dana alokasi umum (DAU), dana desa, atau program kesehatan nasional. Penerimaan dana dari sumber pemerintah ini harus dikelola dengan hati-hati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan biasanya akan melalui tahap dari awal penerimaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan juga tahap monitoring. Pengalokasian dana dari pengelolaan keuangan ini diterapkan pada pembelian obat-obatan dan alat medis, pembayaran gaji staf medis dan non-medis di puskesmas termasuk dokter, perawat, apoteker, tenaga administrasi serta petugas kebersihan.

Hambatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan, mereka mengatakan bahwa hambatan atau kendala yang mereka hadapi dalam mengelola keuangan puskesmas adalah dalam memenuhi kebutuhan puskesmas baik dalam pengadaan barang, obat-obatan dan lain-lain, mereka harus mengusulkan terlebih dahulu dan menunggu persetujuan dari Dinas Kesehatan, mereka harus melewati prosedur yang panjang. Mereka juga mengatakan bahwa terkadang ada perubahan peraturan yang dibuat oleh Dinkes sehingga membuat petugas puskesmas sedikit kesulitan dalam mengelola keuangan. Jadi puskesmas masih sangat bergantung kepada Dinas Kesehatan. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmiyati, 2020) yang menyatakan bahwa kendala yang dirasakan puskesmas dalam mengelola keuangan adalah dalam pengadaan barang yang diharuskan untuk mengusulkan kebutuhan terlebih dahulu

sehingga pihak puskesmas tidak tahu kapan hal itu akan terealisasi, sehingga kebutuhan tidak cepat terpenuhi.

4. PEMBAHASAN

Anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk puskesmas Sukaramai di kota Medan dialokasikan untuk berbagai keperluan yang mendukung operasional dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagian besar anggaran digunakan untuk membeli obat-obatan, vaksin, alat medis, dan perlengkapan kesehatan lainnya yang diperlukan untuk diagnosis, pengobatan dan pencegahan penyakit. Analisis mengenai kebutuhan obat-obatan dan alat medis di puskesmas berdasarkan data epidemiologi, prevalensi penyakit dan demografi masyarakat yang dilayani. Anggaran adalah rencana kegiatan yang dijalankan dalam satu periode membentuk dan mendasar dari manajemen anggaran komprehensif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dikembangkan oleh (M. Fuad dkk, 2021) yang menyatakan anggaran dengan ruang lingkup menyeluruh, karena jenis kegiatannya meliputi seluruh aktivitas perusahaan di bidang marketing, produksi, keuangan, personalia dan administrasi merupakan anggaran komprehensif. Upaya untuk memastikan pengadaan obat dan alat medis dilakukan secara efisien, termasuk melalui proses tender yang transparan dan adil untuk mendapatkan harga terbaik. Penyusunan anggaran harus memperhatikan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan, agar perkembangan inovasi dan teknologi dalam bidang farmasi dan alat medis dapat berkembang dan meningkatkan efisien dan efektivitas layanan kesehatan. Dana dari pemerintah ini juga dialokasikan untuk pembayaran gaji dan honorarium di puskesmas. Ini membantu menghasilkan pengelolaan dana yang lebih efektif dan memberikan penghargaan yang layak kepada tenaga kesehatan yang berdedikasi. Operasional harian juga termasuk dalam pengalokasian dana di puskesmas tersebut. Biaya operasional yaitu penyusunan anggaran untuk biaya operasional harian, termasuk biaya listrik, air, bahan bakar, dan perlengkapan kantor serta fasilitas medis. Anggaran juga dialokasikan untuk biaya komunikasi seperti telepon, internet dan layanan pesan singkat yang diperlukan dalam

koordinasi internal antara tenaga kesehatan dan eksternal dengan pasien atau pihak terkait lainnya. Penyediaan anggaran untuk pelatihan, workshop, dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan, serta pengembangan kepemimpinan dan manajemen. Tidak lupa juga pengalokasian dana dibagi untuk perawatan sarana dan prasarana, pengelolaan limbah medis, pemantauan kualitas layanan, biaya transportasi. Paling penting dana anggaran program kesehatan masyarakat juga digunakan untuk mendukung program kesehatan meliputi imunisasi, pencegahan penyakit menular, promosi kesehatan, penyuluhan, dan kampanye pencegahan penyakit tertentu.

Alokasi terbanyak dalam pengelolaan keuangan dipuskesmas ini digunakan untuk program imunisasi. Karena untuk imunisasi sendiri, biaya yang dikeluarkan untuk program imunisasi lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pengobatan dan perawatan untuk mengobati penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Oleh karena itu, investasi dalam imunisasi dianggap sebagai langkah yang sangat hemat biaya dalam jangka panjang. Program imunisasi telah terbukti efektif dalam mengurangi beban penyakit dan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu, terutama pada anak-anak dan populasi rentan seperti ibu hamil dan lansia. Banyak Negara memiliki program imunisasi nasional yang didukung oleh pemerintah, organisasi kesehatan dunia, dan lembaga donor internasional. Oleh karena itu, puskesmas mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan untuk mendukung program imunisasi ini. Dengan demikian, karena manfaatnya yang besar dalam mencegah penyakit, mengurangi beban kesehatan, dan hemat biaya, program imunisasi menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran di puskesmas. Untuk dana, sejauh ini pihak puskesmas mengatakan ketersediaan dana anggaran untuk program imunisasi terpenuhi. Dilihat dari skala program, cakupan populasi, jenis vaksin serta kebutuhan lainnya.

Proses semua dana yang masuk sangat penting untuk diperhatikan, guna memastikan bahwa dana anggaran dari pemerintah digunakan secara transparan, akuntabel, dan efisien dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana anggaran dari pemerintah melalui beberapa proses tahap dari mulai penerimaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban dan monitoring.

- **Penerimaan**

Proses dimulai dengan perencanaan anggaran, di mana pemerintah menetapkan prioritas dan alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Ini melibatkan proses perencanaan dan penyusunan anggaran yang melibatkan berbagai lembaga dan stakeholder terkait. Setelah perencanaan anggaran disusun dalam dokumen anggaran yang mencakup estimasi penerimaan dan pengeluaran, serta alokasi dana untuk berbagai sektor dan program. Dokumen ini kemudian diajukan kepada badan legislative untuk pembahasan dan persetujuan. Dana anggaran diperoleh melalui berbagai sumber, seperti pendapatan pajak (semacam pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain), pendapatan dari sector ekonomi Negara (seperti pendapatan dari sumber daya alam atau investasi), pinjaman, hibah, serta dana-dana lain yang di setujui sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, selaras dengan kajian yang telah dilakukan oleh (Pakaila, 2021), pendapatan asli adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Setelah anggaran disetujui oleh badan legislative atau lembaga yang berwenang, pemerintahan mulai menerima dana dari berbagai sumber sesuai dengan rencana yang telah disusun. Penerimaan ini mengikuti sistem dan prosedur dari awal, yang dimana mengikuti dari sistematika golongan tahap awal penerimaan sampai pada tahap evaluasi. Yang dimana didalamnya juga berkaitan dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang disampaikan oleh (Hamzani, 2021), sistem dan prosedur penerimaan asli daerah adalah serangkaian proses mulai dari

pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada OPD/PPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun komputerisasi. Penerimaan dana ini merupakan awal dari siklus pengelolaan dana anggaran dan menjadi landasan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

- **Pelaksanaan**

Setelah dana anggaran diterima, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan dana tersebut ke berbagai program, proyek, dan kegiatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam anggaran. Proses ini melibatkan pengelompokan dana berdasarkan sector, wilayah, atau jenis kegiatan. Setelah dana dialokasikan, pemerintah atau instansi terkait akan memulai proses pengadaan barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi sesuai dengan kebutuhan program atau proyek yang akan dilaksanakan. Proses pengadaan ini harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk memastikan transparansi, komperisi, dan efisiensi penggunaan dana. Setelah proses pengadaan selesai, program atau proyek yang telah direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ini termasuk kegiatan-kegiatan seperti penyediaan layanan public, pembangunan infrastruktur, pelatihan, penyuluhan, dan kegiatan lainnya. Setelah proses pelaksanaan, pemerintah akan melakukan pembayaran atas barang jasa, atau pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembayaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selama proses pelaksanaan, pemerintah juga melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan dana untuk memastikan bahwa program atau proyek berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini melibatkan evaluasi secara berkala terhadap capaian hasil,

pengendalian terhadap risiko, dan tindakan perbaikan jika diperlukan.

- **Pelaporan**

Setelah periode tertentu, pemerintah wajib menyusun laporan keuangan yang mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dana dalam periode tersebut. Laporan keuangan ini mencakup informasi tentang sumber-sumber penerimaan, alokasi dana, penggunaan dana, serta saldo dan arus kas. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, baik standar nasional maupun internasional, untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan transparansi informasi keuangan. Sebelum disampaikan ke pihak eksternal, laporan keuangan sering kali diaudit oleh auditor internal pemerintah atau unit pengendalian intern untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal, serta untuk menemukan potensi masalah atau penyimpangan. Setelah laporan keuangan disusun dan diaudit, laporan tersebut kemudian disahkan oleh pihak yang berwenang di pemerintah sebelum disampaikan ke public dan pihak eksternal. Laporan keuangan yang telah disahkan biasanya dipublikasikan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti publik, lembaga pengawas. Publikasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana public.

- **Pengawasan**

Setelah laporan keuangan disiapkan, lembaga audit eksternal yang independen akan melakukan audit terhadap laporan keuangan tersebut. Audit ini dilakukan untuk memastikan keakuratan, kepatuhan, dan kewajaran informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Audit eksternal bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan dana anggaran telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, kebijakan pemerintah, serta peraturan dan regulasi yang mengatur penggunaan dana publik. Pemerintah bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil audit eksternal dengan melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan rekomendasi yang

diberikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masalah yang ditemukan dapat diperbaiki dan tidak terulang di masa mendatang. Pengawasan terhadap pengelolaan dana anggaran dilakukan secara berkelanjutan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas, lembaga legislative, dan masyarakat. Pengawasan ini meliputi evaluasi terhadap kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi penggunaan dana public dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

- **Monitoring**

Monitoring dilakukan secara terus menerus selama periode pelaksanaan program atau proyek yang menggunakan dana anggaran. Tujuannya adalah untuk memantau perkembangan, capaian, dan kinerja program serta penggunaan dana. Dalam proses monitoring, digunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengukur kemajuan dan hasil dari pelaksanaan program atau proyek. Indikator ini mencakup berbagai aspek seperti jumlah layanan yang disediakan, tingkat partisipasi masyarakat, kualitas layanan, dan sebagainya. Selain pemantauan berkelanjutan, dilakukan juga evaluasi rutin terhadap program atau proyek yang menggunakan dana anggaran. Evaluasi ini biasanya dilakukan pada akhir periode tertentu untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, efektivitas, efisiensi, serta dampak dari penggunaan dana. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program atau proyek. Umpan balik ini dapat berupa apresiasi terhadap capaian yang baik, identifikasi masalah atau hambatan, serta rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan di masa mendatang. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara transparan kepada public, lembaga legislative, dan pihak-pihak terkait lainnya. Komunikasi yang terbuka mengenai capaian, tantangan, dan pembelajaran dari pelaksanaan program atau proyek yang menggunakan dana anggaran merupakan bagian penting dari akuntabilitas

dan pembangunan yang berkelanjutan.

Anggaran yang efektif adalah anggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ini berarti dana yang dialokasikan harus mencakup semua aspek yang diperlukan untuk mencapai kinerja target, termasuk sumber daya manusia, peralatan, pelatihan dan lainnya. Target kinerja disini termasuk efektif oleh anggaran, didukung oleh cakupan imunisasi, persentase jumlah anak yang di vaksinasi sesuai dengan jadwal imunisasi yang ditargetkan. Serta persentase pasien yang memberikan penilaian positif terhadap kualitas pelayanan yang diterima di puskesmas. Tetapi ini belum sesuai juknis dari pemerintah, dikarenakan masih adanya anggaran yang belum terlalu responsive terhadap perubahan dalam lingkungan atau kebutuhan proyek serta program. Ini berarti anggaran harus dapat disesuaikan atau direvisi sesuai dengan perubahan situasi, prioritas, atau kondisi yang muncul selama pelaksanaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan keuangan di Puskesmas Medan, terutama Puskesmas Sukaramai, melibatkan sumber pendapatan yang bervariasi, termasuk jasa pelayanan pasien umum, JKN, APBN, APBD, BOK, dan dana hibah. Pengelolaan keuangan yang baik dianggap penting untuk kelangsungan operasional puskesmas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Namun, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, seperti prosedur yang panjang dalam memenuhi kebutuhan puskesmas dan perubahan peraturan dari Dinas Kesehatan yang menyulitkan pengelolaan keuangan. Anggaran dialokasikan untuk berbagai keperluan yang mendukung operasional dan pelayanan kesehatan, termasuk pembelian obat-obatan, alat medis, pembayaran gaji staf medis dan non-medis, biaya operasional, pelatihan tenaga kesehatan, perawatan sarana dan prasarana, serta program imunisasi. Program imunisasi menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran karena efektivitasnya dalam mencegah penyakit dan mengurangi beban kesehatan.

Proses pengelolaan dana anggaran melibatkan tahap penerimaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan monitoring. Penerimaan dana dimulai dengan perencanaan anggaran, dilanjutkan dengan pengalokasian dana sesuai prioritas, pelaksanaan program atau proyek, pembayaran atas barang/jasa, dan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan oleh lembaga audit eksternal dan internal, serta evaluasi rutin terhadap capaian program atau proyek. Pengelolaan keuangan yang efektif adalah yang dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan proyek dan program. Oleh karena itu, fleksibilitas anggaran dalam menyesuaikan dengan perubahan situasi dan prioritas menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan keuangan puskesmas.

6. REFERENSI

- Aristia, a., & andayani, a. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran dana biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi (jira)*, 13(1).
- Bararah, i. (2020). Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Jurnal mudarrisuna: media kajian pendidikan agama islam*, 10(2), 351-370.
- Carlinda desy w, c. D. W. (2022). Koreksi pencatatan piutang dana non kapitasi bpjs sebagai sumber pendapatan puskesmas sukolilo ii (doctoral dissertation, universitas islam sultan agung).
- Edtiyarsih, d. D. (2023). Urgensi anggaran kas dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) yang efisien pada bagian perekonomian dan administrasi pembangunan. *Jaakfe untan (jurnal audit dan akuntansi fakultas ekonomi universitas tanjungpura)*, 12(4), 368-

- Fuad dkk, 2021. Peranan anggaran komprehensif sebagai alat bantu manajemen dalam penilaian kinerja perusahaan. Institut bisnis dan informatika kwik kian giei, jakarta
- Hamzani, h., arifin, m. A., & putra, p. S. (2021). Analisis sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Palembang. *Jurnal media akuntansi (mediasi)*, 3(2), 171–181.
- Hendra, e., asriwati, a., & khairatunnisa, k. (2024). Analisis pelaksanaan kebijakan bantuan operasional kesehatan (bok) dalam peningkatan cakupan imunisasi dasar di puskesmas peulumat kabupaten aceh selatan tahun 2023. *Jurnal pendidikan tambusai*, 8(1), 153-165.
- Meiliana, i. (2022). Analisis rencana dan realisasi anggaran belanja operasional dan belanja modal pada rsau dr. Dody sardjoto (doctoral dissertation, universitas bosowa).
- Nadiroh, n. (2023). Pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pembangunan manusia (survey pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa barat tahun 2014-2019) (doctoral dissertation, universitas siliwangi).
- Ompusunggu, d. P., & irenetia, n. (2023). Pentingnya manajemen keuangan bagi perusahaan. *Cemerlang: jurnal manajemen dan ekonomi bisnis*, 3(2), 140-147.
- Onsardi, o., marini, m., & selvia, e. (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif islam (studi kasus di desa taba padang rejang kecamatan huku palik kabupaten bengkulu utara). *Bilancia: jurnal ilmiah akuntansi*, 4(3), 248-261.
- Pakaila, b. (2021). Analisis sistem dan prosedur pemungutan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kota sorong. *Peluang*, 15(1).
- Rafa habiba, s. (2024). Evaluasi manajemen program imunisasi hpv dalam pencegahan kanker serviks di kota bandar lampung.
- Rahmiyati, a. L., irianto, g., riyanto, a., & rizkiyanti, h. D. (2020). Evaluasi pola pengelolaan keuangan setelah penerapan blud di puskesmas soreang kabupaten bandung. *Pin-litamas*, 2(1), 176-184.
- Rompas, a., & agoes, s. (2024). Pengaruh audit fee, institutional ownership dan litigation risk terhadap kualitas audit dimoderasi dengan komite audit. *Jurnal kontemporer akuntansi*, 4(1), 01-13.
- Salsabila, k. U. (2024). Implementasi pengelolaan dana bok di puskesmas koto baru kabupaten pesisir selatan dalam program ukm esensial masa pandemi covid 19 tahun 2022 (doctoral dissertation, universitas jambi).
- Siregar, j. G. (2024). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa aek nauli i kecamatan pollung kabupaten humbang hasundutan.
- Udzmah, s. L., amalia, f. A., & wicaksono, a. P. N. (2024). Analisis penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance. *Jae (jurnal akuntansi dan ekonomi)*, 9(1), 31-42.